BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini hubungan antarmasyarakat dunia dipermudah dengan adanya globalisasi. Menurut Kenichi Ohmae dalam bukunya *The End of Nation State* (1995), sebagaimana dikutip oleh Simanjuntak (2007), globalisasi adalah “dunia tanpa batas negara” (*a world without borders*).

Globalisasi ini menciptakan peradaban baru di berbagai bidang kehidupan manusia, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, lingkungan, kesehatan, teknologi, dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan oleh Simanjuntak (2007), yaitu:

“Globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka baik dalam sosial budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan.”

Proses globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu permasalahan yang dapat dijawab dari adanya globalisasi saat ini adalah perkembangan sistem teknologi yang juga dapat dimanfaatkan sebagai media dalam proses pemenuhan kebutuhan.

Proses pemenuhan kebutuhan yang dimaksud adalah proses untuk melakukan transaksi jual beli (perdagangan) dalam rangka memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan

primer, sekunder, hingga tersier yang memanfaatkan kemajuan sistem teknologi saat ini. Dengan memanfaatkan sistem teknologi, manusia dapat melakukan transaksi jarak jauh atau tanpa bertemu langsung antara pedagang maupun pembeli. Dengan adanya skema seperti ini, sistem perdagangan yang merupakan bagian dari ranah ekonomi juga berevolusi dengan memiliki istilah baru, yaitu ekonomi digital.

Ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) yang memungkinkan transaksi, pertukaran nilai, dan pengembangan bisnis melalui jaringan internet dan teknologi lainnya. Dalam ekonomi digital, transaksi bisnis dilakukan secara *online*, dan data serta informasi bisnis diproses secara elektronik (Nasution, 2024). Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Nasution tersebut, praktik ekonomi digital yang memanfaatkan TIK sangat mempengaruhi munculnya media aplikasi perdagangan digital termasuk di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Aplikasi perdagangan digital tersebut atau yang biasa disebut dengan lokapasar (*Marketplace*) merupakan sebagai penyedia sarana yang sebagian atau keseluruhan proses transaksi berada di dalam Sistem Elektronik berupa situs web atau aplikasi secara komersial sebagai wadah bagi Pedagang (*Merchant*) untuk dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023).

Dengan kemudahan yang diberikan oleh *marketplace* dalam memenuhi kebutuhan manusia tanpa harus bertemu langsung antar pelaku ekonomi (produsen, pedagang, dan pembeli), memberikan dampak positif yang menimbulkan kebiasaan

baru di masyarakat, yaitu pengalaman belanja yang mudah dan cepat. Kemudahan tersebut secara spesifik dirasakan oleh para Pedagang (*merchant*) di *marketplace* itu sendiri, di mana mereka dapat berjualan tanpa harus memiliki stok produk tersedia di tempat atau gudang mereka. Pedagang tersebut dapat melakukan proses *dropshipping*, di mana Pedagang atau yang disebut dengan *dropshipper* hanya akan memproses pesanan pembeli terhadap produk tertentu kemudian melakukan pembelian kepada produsen dan mengirimkan produk tersebut kepada pembeli atas nama pedagang itu sendiri.

Produsen atau distributor yang menyediakan barang untuk proses *dropshipping* ini ada yang berlokasi di dalam negeri maupun luar negeri Indonesia. Meskipun berkembangnya *e-commerce* memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia, namun juga memicu masalah baru yang timbul akibat adanya persaingan dagang antara produsen lokal dengan produsen luar negeri. Hal yang memicu kondisi ini adalah kualitas produk dari produsen luar negeri yang umumnya lebih unggul dan ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kualitas produk produsen lokal. Perbedaan kualitas produk tersebut disebabkan karena adanya perbedaan teknologi mesin produksi dan juga adanya perbedaan dari kreativitas hasil produksi yang memberikan keunikan tersendiri untuk produk yang dihasilkan.

Persaingan dagang ini berpotensi melemahkan kondisi perekonomian usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia karena produk-produk impor dapat masuk dengan mudah ke pasar domestik Indonesia melalui perdagangan digital

dengan harga yang tidak masuk akal. Untuk mencegah terjadinya persaingan yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Salah satu pasal dalam peraturan tersebut yang dapat menindaklanjuti persaingan dagang dalam perdagangan digital adalah Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi:

“PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat lintas negara, wajib menerapkan harga Barang minimum pada Sistem Elektroniknya untuk Pedagang (*Merchant*) yang menjual langsung Barang jadi asal luar negeri ke Indonesia.”

Serta dijelaskan juga dalam Pasal 19 Ayat (2) yang berbunyi:

“Harga Barang minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar *Freight on Board* (FOB) USD 100 (seratus *United States Dollar*) per unit.”

Dengan adanya dua pasal tersebut, diharapkan dapat mengurangi persaingan perdagangan antara produsen lokal dengan produsen luar negeri. Di mana saat ini, per tanggal 8 September 2024, kurs USD terhadap Rupiah adalah Rp15.458, yang menandakan bahwa harga minimum barang jadi asal luar negeri yang diizinkan untuk diperjual-belikan oleh Pedagang di Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik (PPMSE) ada di kisaran Rp1.545.800 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri tersebut yang di mana berusaha untuk melindungi para pelaku usaha UMKM, namun ini juga berdampak terhadap para pedagang yang melakukan *dropshipping* itu sendiri. Secara tidak langsung, pemerintah mengurangi kesempatan aktivitas perdagangan jual beli bagi *dropshipper*. Kondisi ini juga mempengaruhi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) di *marketplace* itu sendiri.

Bagaikan buah simalakama, peraturan menteri tersebut dapat menghidupkan UMKM, namun di sisi lain mematikan para pedagang *dropshipper* itu sendiri. Oleh karena itu, tantangan baru dari kondisi perkeonomian digital adalah diperlukannya kegiatan penunjang kreativitas bagi UMKM untuk dapat memproduksi produk yang memiliki keunikan tersendiri serta diperlukannya pemberian modal usaha agar dapat menekan harga produksi sehingga menghasilkan keluaran produk dengan harga yang kompetitif hingga pada akhirnya, pedagang *dropshipper*-pun juga dapat melakukan penjualan produk-produk lokal hasil karya UMKM di Indonesia.

Globalisasi dan perdagangan digital adalah dua hal yang saling berkaitan erat, dikarenakan adanya hubungan sebab akibat. Dengan hadirnya globalisasi, maka akses pasar global menjadi terbuka, teknologi memungkinkan aktor non-negara, seperti perusahaan dapat menjangkau pasar global tanpa adanya batasan geografis yang

signifikan. Selain itu, dampak adanya persaingan dagang dapat mendorong inovasi pembaharuan produk agar memiliki keunikannya sendiri.

Selain hal-hal positif di atas, terdapat juga tantangan dan risiko yang perlu dihadapi, yaitu persaingan dagang antara pedagang atau UMKM lokal dengan para *dropshipper* yang melakukan impor produk karena perbedaan kualitas dan harga yang signifikan. Selain itu, juga terdapat masalah regulasi yang di mana memberikan batasan impor untuk dapat mengatasi persaingan dagang tersebut sehingga secara tidak langsung mempengaruhi ekosistem perdagangan di *marketplace*.

Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, di lihat dari dampak positif serta tantangan dan resiko yang dihadapi oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku UMKM hingga *dropshipper* atau pedagang (*merchant*) di *marketplace*, maka penelitian ini diperlukan untuk memahami latar belakang kebijakan tersebut dibuat dan bagaimana dampak dari implementasi kebijakan tersebut dengan mengambil judul tesis yaitu: Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam Ekonomi Digital tentang Pembatasan Impor Barang Jadi: Studi Kasus Perlakuan Khusus dalam *E-Commerce*.

1.2. Rumusan Masalah

Persaingan dagang antara produsen lokal dengan produsen luar negeri akibat berkembangnya *e-commerce* menimbulkan masalah baru. Sehingga muncul pro dan kontra sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengkaji secara mendalam kegiatan ekonomi digital serta kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional Indonesia. Dengan demikian, perumusan pertanyaan penelitian disusun sebagai berikut:

- 1) Bagaimana praktik-praktik dalam *e-commerce* dapat menciptakan disrupsi dalam perdagangan internasional Indonesia?
- 2) Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dapat memitigasi praktik-praktik perdagangan digital (*e-commerce*) selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bentuk praktik-praktik dalam *e-commerce* yang dapat menciptakan disrupsi dalam perdagangan internasional Indonesia. Dengan didukung berbagai data kuantitatif (statistik) dan dilakukan proses analisis data, maka penjabaran dalam tesis ini berkaitan erat dengan praktik-praktik yang terjadi dalam ekonomi digital, pemangku kepentingan yang terlibat, serta dampaknya terhadap perdagangan internasional Indonesia.

Selain itu, penelitian tesis ini berguna untuk dapat memahami sikap dan langkah pemerintah Indonesia dalam memitigasi permasalahan yang muncul dari praktik perdagangan digital, khususnya selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendalam di bidang studi dan akademis terkait adanya perkembangan global sehingga diperlukannya keselarasan dengan teori dan konsep yang sudah ada, khususnya di bidang Hubungan Internasional dan Perdagangan Internasional. Ditunjukkan dengan adanya kaitan antara Hubungan Internasional dengan globalisasi, serta Perdagangan Internasional dengan ekspor impor yang dialami secara empiris dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga memberikan informasi yang berguna bagi Pemerintah Indonesia, khususnya pembuat kebijakan di sektor perdagangan digital untuk dapat meninjau dan/atau merumuskan kebijakan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan dunia kedepan sehingga mendukung ekonomi berkelanjutan.

Kajian ini berpotensi menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang bersifat lebih mendalam mengenai peran kebijakan pemerintah untuk dapat melindungi serta mencegah fenomena disruptif dalam ekosistem perdagangan digital yang semakin kompleks.

1.5. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun ke dalam beberapa bab yang di mana setiap bab memuat uraian sesuai dengan topik yang diangkat dalam judul bab. Setiap bab saling berkaitan dan tersusun secara sistematis, membentuk alur yang koheren dan terintergrasi. Struktur ini dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah naskah akademis yang utuh dan komprehensif. Struktur bab dalam tesis ini disajikan sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini, peneliti akan merinci dan/atau menjabarkan alasan mengapa dimunculkannya judul tesis ini dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

Pada bab ini, memaparkan hal-hal yang dapat memperkuat penelitian ini dan diharapkan dapat meyakinkan pembaca dengan melampirkan tinjauan pustaka penelitian terdahulu yang dibagi menjadi dua sub-bab, yaitu perkembangan *e-commerce* dan ekonomi digital serta *e-commerce* dan kebijakan pemerintah. Kemudian juga memunculkan istilah-istilah yang perlu dijabarkan, mendeskripsikan definisi, teori, dan konsep melalui kerangka berpikir, seperti teori dan konsep neo-

merkantilisme; neo-merkantilisme digital; perdagangan global; ekonomi digital; disrupsi pasar; dan kebijakan pemerintah yang kemudian memvisualisasikannya dengan kerangka analisis untuk dapat diambil kesimpulan sementara sebagai argumen penelitian.

BAB 3 METODOLOGI

Dalam bab ini, peneliti menyampaikan detail-detail proses pencarian jawaban dari apa yang telah ditentukan pada rumusan masalah dimulai dengan memaparkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, metode penelitian studi kasus, proses pengumpulan data dengan cara penelusuran dalam jaringan (*online searching*), hingga proses analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Di bab ini, peneliti akan menguraikan hasil-hasil dari kegiatan proses pencarian jawaban dengan menuangkan dan menjelaskan data-data penelitian yang dihubungkan dengan kerangka teori yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Adapun data-data penelitian yang dituangkan dan dijelaskan adalah kondisi perdagangan global dan ekonomi digital, baik data secara global, Asia Tenggara, dan

Indonesia. Dilanjutkan dengan penjelasan disrupsi pasar yang terjadi hingga kebijakan pemerintah sebagai langkah memitigasinya.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini akan menandakan bahwa penelitian telah mencapai bagian akhir dibuktikan dengan adanya kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembaca. Di mana kesimpulannya adalah diperuntukkan menggarisbawahi jawaban dari pertanyaan penelitian yang kemudian diberikan rekomendasi untuk penelitian mendatang ataupun kebijakan pemerintah.